

Zona Integritas **BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

**Buku
Saku**

 **BALAI TEKNIK BENDUNGAN**
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BerAKHLAK
Berakhlak: Berprestasi, Berkeadilan, Berkompetensi,
Berharmoni, Layak, Adaptif, Kolaborasi


SISDA
BALAI TEKNIK
BENDUNGAN





Pesan Menteri PUPR

Korupsi terjadi karena **niat dan peluang**.
sebaik apapun sistem kalau niatnya masih
ada, pasti masih akan terjadi. untuk itu
Insan PUPR **harus bekerja secara amanah
& profesional** agar terhindar dari korupsi.

Sambutan Menteri PUPR pada **Pencanangan Zona Integritas
dan SMAP** di 9 UPT Ditjen Bina Konstruksi pada 26 Mei 2021

Kami
sudah Digaji,
Tidak Perlu
Diberi Lagi



Zona Integritas & Definisinya **02**

Roadmap Zona Integritas **05**

Susunan Tim Pembangunan
Zona Integritas BTB **06**

Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas BTB **09**

Link Upload Dokumen **17**

Dokumentasi Sosialisasi
& Evaluasi Zona Integritas BTB **18**



Yuk kenalan sama
GRATIFIKASI
supaya terhindar
dari virus korupsi

01



Zona Integritas dan Definisinya



Zona Integritas

Selanjutnya disebut sebagai ZI, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Selanjutnya disebut sebagai menuju WBBM, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, panataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pelayanan publik

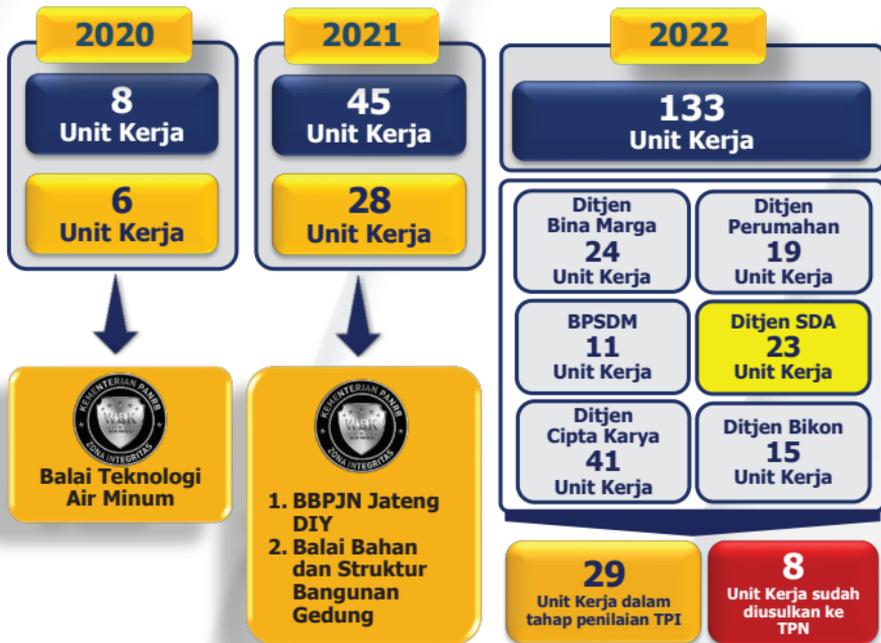
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai menuju WBK, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, panataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja



Roadmap Zona Integritas





Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Teknik Bendungan

PENGARAH
Kepala Balai
Ketua Merangkap Anggota

**PELAKSANA BIDANG
MANAJEMEN PERUBAHAN**

1

Anissa Mayangsari, ST.M.PSDA
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Ir.Joko Mulyono, ME
Ir.Benhard Jonggi P.S.,M.PSDA
Dio Fairuz Akhbar, ST
Aris Rinaldi, ST
Dicky Erista, ST
Ida Mahmudah, S.AP



Pindai disini

**PELAKSANA BIDANG
PENATAAN TATA LAKSANA**

2

Tri Hartanto, ST
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Adib Lathiful Huda, ST, MT
Suhendri, ST, MT
Gemma Galagani Tunjung D, ST
Aghia Aghniafina, ST
Nur Fitriani Sofiati, ST
Reza Syahroni, ST

**PELAKSANA BIDANG
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA**

3

Gunawan Aribowo, SE, ME
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Dwi Sari Hartini, ST
Ambar Dian Wirawati, SE
Dini Yuniarti
Fita Rachmawati
M. Rizqi Aris Munandar, S.Kom
Puji Astuti, A.Md

4

**PELAKSANA BIDANG
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Widi Pradipta, S.T., M.Eng
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Aldia Kemala Fatikha, ST
Melati Putri Amargia, ST
Herry Heriyanto, S.AP
Mediana Dolores Simanjuntak

5

**PELAKSANA BIDANG
PENGUATAN PENGAWASAN**

Nofyar Dwi Khurtumi, ST. M.PSDA
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Syahrul, ST
Nur Lely Hardianti Zendrato, ST.MT
Tengku Julianti, SM
Wandha Anindita Permana, ST

6

**PELAKSANA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Sarwedi, SE
Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Kohar Rahmat Pratama, S.AP
Sidik Supri Atinar, S.AP
Alip
M. Irfan Baehaqi
Risma Solianti, SE
Harry Mulyono, SE, MA



Pindai disini

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai Teknik Bendungan

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Memelihara mekanisme pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan mensosialisasikan secara berkelanjutan

1. Menyusun SK Kepala Balai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
2. Menyusun rencana kerja ZI tahun 2022
3. Mensosialisasikan penerapan dokumen rencana kerja ZI tahun 2022

Memelihara mekanisme atau media dalam mensosialisasikan pembangunan ZI

1. Penyusunan dokumen rencana kerja disesuaikan dengan format dari Inspektorat Jenderal yang memuat target-target dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
2. Sosialisasi secara internal tentang Zona Integritas kepada seluruh unsur di balai

Melaksanakan monev terhadap penerapan pembangunan ZI

1. Tim manajemen perubahan melaksanakan monev pembangunan ZI melalui rapat internal serta tindak lanjutnya

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM

Penyampaian LHKPN dan LHKASN para wajib lapor Balai

Menetapkan dan melakukan evaluasi agen perubahan

1. Ka Balai dan Tim Pkja ZI menetapkan Agen Perubahan
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja agen perubahan terkait rencana kerja agen perubahan

Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Balai

- Program kerja Agen Perubahan sebagai prioritas di tahun 2022
1. Pembagian buku saku ZI
 2. Rapat progres
 3. Internalisasi disiplin pegawai (absensi, dll)

II. PENATAAN TATA LAKSANA

Memelihara dan menyiapkan SOP yang mengacu pada peta bisnis proses

1. Menginternalisasi Peta Bisnis Proses dari unit organisasi menjadi peta bisnis proses unit kerja
2. Menyiapkan daftar SOP (SOP generik) yang telah direview

Menerapkan dan mengevaluasi SOP yang telah diterapkan

1. Melakukan sosialisasi terhadap SOP yang telah direview, direvisi dan disahkan
2. Mengumpulkan hasil penerapan seluruh SOP dan melakukan tindak lanjut berupa perbaikan atau usulan perbaikan (bila diperlukan)

Memastikan pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

Memastikan penerapan teknologi informasi dalam mengukur penilaian e-monitoring, LAKIP, dll

Memastikan pemberian pelayanan publik telah menggunakan teknologi

1. Pelaksanaan pengoperasian layanan informasi publik dan penggunaan buku tamu online
2. Melakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, SDM dan pelayanan publik

Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

1. Penyusunan SK PPID Balai atau mereview aturan PPID KemenPUPR dan instansi pembina
2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Menyiapkan kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

1. Penetapan peta jabatan, anjab
2. Menyiapkan SK penempatan pegawai
3. Monitoring evaluasi penempatan pegawai

Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

1. Tim penataan SDM menyusun peta jabatan dan kriteria
2. monitoring evaluasi mutasi pegawai

Melakukan Training Need Analysis kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, inhouse training, atau melalui coaching /mentoring, dll

1. Pelaksanaan bimtek jafung / diklat / mentoring
2. Monev hasil pengembangan kompetensi

Memastikan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan sesuai dengan indikator level di atasnya

1. Pengisian SKP Mandiri
2. Pemantauan penilaian SKP melalui e-kinerja
3. Memberikan reward dari hasil penilaian kinerja dengan mengusulkan pegawai teladan tingkat Kementerian PUPR dan syarat kenaikan pangkat

Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan

1. Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
2. Pimpinan membuat surat peringatan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan memberikan reward bagi pegawai yang melaksanakan aturan kepegawaian dengan baik contoh kehadiran

Melaksanakan pemutakhiran Data Informasi kepegawaian diupdate secara berkala

1. Tim SDM melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa pegawai dapat mengupdate data kepegawaian masing-masing melalui aplikasi e-HRM

Memastikan operasionalisasi manajemen SDM adalah menggunakan teknologi informasi

1. Mengupdate daftar aplikasi yang digunakan (e-hrm, Bravo, e-LKP, e-kinerja)
2. Mengupdate data terkait operasionalisasi manajemen SDM melalui data center yang dapat diakses melalui HP (mobile apps)



Pindai disini

IV. Penguatan Akuntabilitas

Memastikan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan dan Penetapan Kinerja

1. Pimpinan terlibat dalam rapat penyusunan program anggaran tahun 2021 rapat pembahasan Perjanjian kinerja Tahun 2022, Rapat Penyusunan Draft Renstra 2020-2024
2. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Rapat Progres setiap bulan

Memastikan adanya dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

1. Melakukan rapat pembahasan dokumen perencanaan
2. Mereview dokumen Renstra tahun 2020-2024
3. Menyiapkan indikator kinerja utama (IKU)
4. Memastikan indikator kinerja yang disusun sudah SMART

Memastikan laporan kinerja tepat waktu dan memberikan informasi tentang kinerja

1. Memastikan bahwa penyusunan dan penyerahan LAKIN, Laporan keuangan dan BMN tersedia tepat waktu

Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Memastikan petugas penyusun laporan kinerja telah mengikuti diklat/bimbingan teknis penyusunan laporan LAKIN, Keuangan dan BMN

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Pengendalian Gratifikasi

1. Melaksanakan public-campaign pengendalian gratifikasi secara berkala

Penerapan SPIP

1. Melakukan identifikasi risiko, analisis dan pengendalian risiko yang dituangkan dalam laporan Manajemen Risiko
2. Menetapkan rencana tindakan perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana pengendalian risiko
3. Melakukan analisis risiko berdasarkan skala kemungkinan dan dampak
4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepada seluruh pihak terkait
5. Membuat daftar pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan

Pengaduan Masyarakat

1. Menyusun SK untuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Melaksanakan monev atas penanganan pengaduan masyarakat

Whistle Blowing System

1. Melakukan internalisasi Whistle Blowing System (WBS)
2. Melakukan rapat evaluasi atas penerapan WBS

Penanganan Benturan
Kepentingan

1. Melaksanakan reviu pada benturan kepentingan
2. Melakukan sosialisasi / internalisasi penanganan benturan kepentingan
3. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Terdapat kebijakan standar pelayanan

Identifikasi mengenai kebijakan standar pelayanan

Standar pelayanan telah dimaklumkan

Melakukan reviu dan menetapkan maklumat Pelayanan, Mensosialisasikan Maklumat Pelayanan

Menerapkan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Melakukan pemantauan penerapan terhadap SOP terkait pelayanan berkoordinasi dengan tim penataan tata laksana

Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Reviu SOP terkait pelayanan publik

Sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

Melakukan sosialisasi penerapan Budaya Pelayanan Prima dengan mengacu pada SOP terkait, sosialisasi penggunaan aplikasi layanan publik internal

Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media

1. Melakukan sosialisasi dan publikasi layanan aplikasi pelayanan publik internal melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik

Penerapan reward dan punishment bagi tim pelaksana pelayanan publik

1. Menyusun konsep bentuk reward yang diberikan kepada pelaksana layanan contoh dalam bentuk sertifikat / piagam
2. Menyusun reward yang diberikan kepada pelanggan contoh : memberikan merchandise kepada mitra kerja jika jumlahnya ada 10 kali layanan yang sejenis , dll

Sarana layanan terpadu/integrasi

Melakukan pemantauan kondisi ruangan untuk Pelaporan Terpadu dan Petugas yang standby

Inovasi pelayanan

Melakukan pengembangan layanan andalan Balai melalui teknologi informasi

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan dapat diakses publik

1. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat / mitra kerja atas penggunaan seluruh layanan Balai
2. Melaksanakan survei kepuasan pegawai atas layanan internal Balai
3. Melakukan publikasi hasil survei melalui media informasi Balai baik cetak maupun online
4. Tidak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat



Pindai disini

Link Upload Dokumen

https://s.id/upload_ZI_BTBT



Dokumentasi Sosialisasi & Evaluasi







M. Basuki Hadimuljono



Pesan Menteri PUPR

Khusus untuk para Kepala Balai, saya ingatkan saudara sekalian telah diambil sumpah dan telah menandatangani pakta integritas. Ini semua adalah upaya untuk bisa memagari dari tindak korupsi. Intinya adalah niat kita masing-masing, tidak mudah jadi pejabat saat ini karena banyak rambu-rambunya dan banyak yang mengawasi

Sambutan Menteri PUPR pada **Pencanangan Zona Integritas** di 16 UPT Ditjen Perumahan pada 25 Juni 2022

4 Big No's



No Bribery!



No Gift!



No Kick Back!



No Luxurious Lifestyle!



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**



<https://gol.itjen.pu.go.id/>
+62 813-1690-0022 | upg_kementerian@pu.go.id
linktr.ee/jagaintegritaspupr